

MODERASI BERAGAMA DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Mukhtar

STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

E-mail: tarkik.muchtar6@gmail.com

Abstract

The Archipelago Capital (IKN), envisioned as a city of the future not only for Indonesia but for the world, has captured widespread attention. Located in East Kalimantan, IKN has sparked both support and opposition from various groups. Supporters believe that IKN will enhance the local economy, while opponents argue that it will harm the environment and threaten cultural traditions. One major concern with large-scale migration to IKN is the potential for conflicts between newcomers and local residents. This study adopts a library research approach, drawing data from primary literature on IKN and religious moderation, as well as other supporting sources. The data is then analyzed to formulate insights relevant to addressing challenges associated with the establishment of IKN. The findings indicate that IKN has the potential to trigger conflict; thus, a religious moderation approach is essential for mitigation. Key approaches include fostering national integration of religion and culture, educating about moderation values through religious teachings, and using symbols that embody the principles of religious moderation.

Keywords: *Moderasi Beragama, Pembangunan Manusia, IKN*

Pendahuluan

Tidak lama lagi, pusat pemerintahan Indonesia akan berpindah ke Indonesia wilayah timur, tepatnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur. IKN yang dibangun dengan visi menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan sebagai symbol identitas yang merepresentasikan keberagaman Indonesia tentunya menjadi perhatian bagi banyak pihak (Republik, 2022).

Kehadiran IKN tersebut tidak hanya menjadi pusat perhatian bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia internasional. Sebagai titik fokus pembangunan dan inovasi di Indonesia masa depan, IKN bukan hanya sebuah tempat untuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia (*Ibu Kota Nusantara*, n.d.), maka disitulah tentunya keberadaan IKN juga menjadi sebuah laboratorium mencapai moderasi beragama yang berkelanjutan dan mempromosikan pembangunan manusia yang inklusif.

Kalau dilihat dari kondisi Geografis berdasarkan UU No 3 tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, IKN berdiri di 3 wilayah Kabupaten, seperti sebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.(Republik, 2022)

Sementara itu kalau ditinjau dari kondisi sosial masyarakat, di Kalimantan Timur terdapat beragam suku, diantaranya Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Batak, Lombok, Bima dan sebagainya. Begitupun dari aspek agama, di Kalimantan Timur terdapat beragam agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu(Christover, 2019).

Dengan populasi yang semakin beragam di wilayah IKN tentunya menawarkan tantangan unik dalam memelihara harmoni antar beragam keyakinan. Di tengah dinamika urbanisasi dan globalisasi, keberagaman, agama menjadi aset penting yang memperkaya kultur dan identitas IKN. Misalnya saja, urbanisasi yang akan dilakukan oleh para pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju IKN menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Anas, dikutip dari kompas.com mencapai ribuan orang dengan tiga tahap. Untuk tahap pertama sekira 11.916 ASN walaupun untuk jumlah pastinya belum bisa dipastikan, kemudian tahap kedua sebanyak 6.744 ASN dan tahap ketiga 14.237 ASN (Ulya, 2024)

Hal ini tentu perlu menjadi perhatian karena mengingat keberadaan IKN akan membuka ruang interaksi yang baru, interaksi yang terbuka dari berbagai ragam latar belakang baik agama, suku, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya yang memengaruhi dinamika sosial dan berpotensi memunculkan konflik(Purnomo et al., 2022). Selain itu, seperti temuan Heru Prasetyo bahwa, adanya urbanisasi ke IKN akan memunculkan budaya baru dan konflik akibat kesenjangan sosial dari urbanisasi tersebut.(Susanto, Hari, 2022)

Keberagaman suku, budaya, dan agama tersebut tentulah perlu diantisipasi agar tidak menyebabkan konflik yang dapat menghambat pembangunan. Sebuah pendekatan perlu dilakukan dalam pembangunan manusia di wilayah IKN tersebut, tidak hanya soal integrasi sosial budaya yang dibuthkan dalam soal urbanisasi atau migrasi (Azzahra et al., 2023), melainkan juga soal agama melalui moderasi beragama.

Moderasi beragama muncul sebagai pendekatan yang diperlukan dalam menanggapi tantangan ini. Dengan mempromosikan pemahaman yang inklusif dan toleran terhadap keyakinan agama, moderasi beragama membuka jalan bagi dialog antar

agama yang produktif dan kerjasama antar umat beragama. Pentingnya moderasi beragama menurut Menteri Agama RI Lukman Hakim diantaranya dengan pemikiran yang moderat dapat menjaga martabat dan nyawa manusia, menjaga peradaban manusia, dan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan.(Ri, 2019) Dengan moderasi beragama, harmoni antar agam bisa terwujud dengan pemikiran-pemikiran yang terbuka/inklusif (Arifandi et al., 2023).

Begitu pula halnya dengan wilayah IKN, urbanisasi yang akan dilakukan secara massal dan bertahap tersebut perlu kiranya menjadi kajian penting mengenai dampak negative yang mungkin terjadi, pasalnya integrasi dan adaptasi tidak mudah dilakukan, terlebih lagi jika mengacu pada temuan BIN tentang paham radikalisme yang menjangkiti berbagai elemen masyarakat. Misalnya tahun 2019 Menteri Pertahanan Ryamizar Ryacudu memaparkan 23.4% mahasiswa di Indonesia terpapar ekstrimisme, 19,4 % pegawai negeri, 9,1 % pegawai BUMN, dan 3 % prajurit TNI (Rosyad & Setia, 2021).

Berdasar temuan tersebut, maka siapapun termasuk Tentara Nasional Indonesia yang jelas jelas “kenyang” akan asupan nasionalisme dan mempunyai tugas menjaga kedaulatan Indonesia tidak luput dari virus ekstrimisme, apalagi elemen elemen lain di luar TNI, maka idealnya dalam pembangunan manusia di IKN perlu dilakukan melalui pendekatan moderasi beragama.

Tulisan ini mencoba menawarkan gagasan pengarustamaan moderasi beragama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), mengingat belum banyak tulisan yang membedah IKN dari perspektif pembangunan manusia melalui pendekatan moderasi beragama.

Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah library reseach (penelitian pustaka). Sumber data primer dalam penelitian ini yakni artikel dan buku buku yang mengulas tentang IKN dan Moderasi Beragama. Sementara data skunder yakni buku buku, artikel, jurnal, berita berita internet yang relevan dengan topik penelitian.

Penulis menghimpun data dari bermacam sumber, seperti buku, artikel maupun berita di media, kemudian menginterpretasikan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menghimpun data yang selaras dengan topic penelitian secara konsisten dan sistematis,

selanjutnya dianalisis, diseleksi dan digabungkan untuk memperoleh kesimpulan secara deduktif induktif (dari umum ke khusus).

Hasil dan Pembahasan

IKN dan Tantangan dalam Pembangunan Manusia

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur nampaknya bukan hanya wacana, melainkan keseriusan pemerintahan saat ini untuk memindahkan Ibu Kotanya kian jelas. Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada Agustus 2019, Jokowi mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Dan mulai saat itu kemudian pemerintahan Jokowi menggelar sayembara untuk penataan kota, logo, perangkat pengelola IKN dan sebagainya dalam mewujudkan kota masa depan dunia (Kodir et al., 2021). Setelah itu, pada Januari 2022, disahkanlah UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai pondasi dalam membangun IKN.

Kehadiran IKN tentu tidak berjalan mulus begitu saja, dalam prosesnya, menuai berbagai pandangan. Ada kelompok yang menerima kehadiran IKN dengan anggapan akan berdampak pada perubahan ekonomi dan sosial menjadi lebih baik. Sementara kelompok lain yang datang dari Kalimantan Timur seperti tokoh adat dan LSM menolak dengan alasan kekhawatiran akan nasib tanah adat dan lingkungan, sebagian lain menyikapinya secara netral (Sumarni dkk, 2021).

Berbagai pertimbangan menjadi alasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara, diantaranya konsep Indonesia sentris, yakni pembangunan dilakukan di tengah tengah Indonesia. Kedua adalah aspek ekonomi, teknologi dan lingkungan, yang mana dengan pemindahan ke IKN akan menumbuhkan ekonomi yang inklusif serta menjadi kota modern. Ketiga aspek sosiologi dan budaya, yakni dapat memperkuat kondisi sosial, ekonomi dan budaya dan mencegah terpinggirkannya masyarakat lokal (Puspitaningrum & Sundoko, 2023).

Namun dibalik “masa depan” yang ditawarkan, tantangan pemindahan IKN berkelindan menghantui. Seperti misalnya penduduk IKN rentan rawan pangan karena di Kalimantan Timur secara umum belum swasembada pangan. Selain itu, krisis air bersih juga menghantui karena daerah IKN terindikasi sangat minim sumber air baku. Dan potensi banjir, gempa bumi dan tsunami akibat longsoran bawah laut tiga titik sesar yakni Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternotes juga menjadi ancaman (Jaya,

2022). Tidak hanya itu, perpindahan Ibu Kota Negara ke IKN memunculkan potensi konflik karena faktor perbedaan suku, budaya maupun keyakinan, dan di Kalimantan sendiri pernah terjadi konflik horizontal yang banyak memakan korban seperti kasus sampit maupun kasus Paser(Djayanti, Hana & Al, 2022). Bahkan, dikutip dari Hana Dwi Jayanti dalam Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia, menurut data BPS, Kalimantan Timur menjadi provinsi tertinggi tingkat konflik massal dibandingkan dengan Provinsi lain di Kalimantan(Djayanti, Hana & Al, 2022). Hal yang mencengangkan juga berdasar temuan Ali Kusno yang menganalisis Group Facebook Bubuhan Samarinda, bahwa potensi konflik bernuansa SARA bisa terjadi akibat kesukuan. Tingginya primordialisme dan provokasi stigma pendatang adalah perusak lingkungan serta suku asli harus disegani juga menjadi ancaman terjadinya konflik(Kusno, 2017).

Moderasi Beragama: Islam dan Ajaran Kebhinekaan

Moderasi berasal dari bahasa latin *moderatio* yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebih lebihan). Dalam bahasa Indonesia kata moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) berarti pengurangan kekerasan/penghindaran ke-ekstriman. Sedangkan dalam bahasa arab, moderasi dikenal dengan *wasath* atau *wasathiyah* yang memiliki padanan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *I'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Dari sini kemudian moderasi dapat dipahami sebagai pemahaman sikap dan perbuatan yang berprinsip pada posisi di tengah-tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama(Ri, 2019)..

Sementara itu, menurut Fauziah Nurdin, dalam Al-Quran dan Hadis mengajarkan nilai nilai yang relevan dengan makna moderasi seperti tidak mendorong umat Islam untuk melakukan kekerasan, bersikap ekstrem, atau berlebihan dalam beragama. Al-Qur'an dan Hadis juga menekankan bahwa dalam memahami dan menjalankan ajaran agama, diperlukan pendekatan yang seimbang dan mengedepankan jalan tengah. Bahkan, keseimbangan ini merupakan hal yang niscaya, termasuk dalam hukum alam yang berjalan harmonis dalam kehidupan(Nurdin, 2021) Dalam rumusan kementerian agama, sikap moderat dalam beragama bisa terwujud jika mempunyai pengetahuan luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melampaui batas dan berhati hati(Ri, 2019).

Tidak dipungkiri Indonesia dengan banyak pulau, beragam suku, etnis, budaya maupun agama masih kokoh berdiri dengan pengikat semboyan Bhineka Tunggal Ika (Santoso et al., 2023). Namun jauh sebelum semboyan Bhineka Tunggal Ika lahir, ajaran Islam telah mengajarkan bagaimana prinsip hidup berdampingan dengan beragam kenyataan, diantaranya adalah soal menjaga persatuan seperti yang tercermin dalam Qs. Al-Imron 103 yang ditinjau dari tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbah dan Al-Qurtubi (Mukhtar & Hamidah, 2021)

Selain pentingnya persatuan, Islam juga mengajarkan untuk menghargai bahasa dan keragamannya, seperti dalam surah Ar-Rum: 30 yang artinya “diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah penciptaan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu...”. Dikutip dari Wawasan Al-Qur’an karya Qurais Shihab perbedaan bahasa juga tercermin dalam Hadis Riwayat Muslim yang menyatakan Al-Qur’an diturunkan dalam tujuh bahasa. Pentingnya bahasa, menurut Qurais Shihab merupakan unsur perekat dan kesatuan umat dan sekaligus menjadi bukti kebesaran Allah swt. Selain itu, Islam juga mengajarkan penghargaan terhadap adat istiadat. Hal itu tercermin dalam Qs. Al-A’raf (7): 199 yang artinya “jadikanlah engkau pemaaf dan titahkanlah yang ‘urf (adat kebiasaan yang baik) dan berpalinglah dari orang yang jahil”. Menurut Qurais Shihab, kata ‘urf dan ma’ruf tersebut mengacu kepada kebiasaan dan adat istiadat yang baik, yaitu prinsip-prinsip Islam (Ma, 1996)

Tidak hanya Islam, nampaknya agama lain pun mengajarkan hal yang mirip dengan cara pandang seperti moderasi beragama. Misalnya dalam ajaran Kristen ada namanya kasih kepada Allah dan sesama yang menjadi prinsip dalam interaksi sosial. Dalam Kristen juga pendekatan moderasi beragama dilakukan saat menengahi ekstrimis tafsir yang dipahami sebagian umatnya. Dalam Katolik ada sebutan umat sebagai persekutuan iman, harapan dan cinta kasih. Didalam ajaran agama Hindu terdapat dasar dalam moderasi beragama “*Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*” yakni seimbang antara fisik dan jiwa (atman). Dalam Budha, ada empat prasetya, yaitu menolong antar makhluk, menolak kemauan yang bersifat duniawi, mempelajari mengamalkan Dharma, serta berusaha untuk meraih Pencerahan Sempurna (Nisa, Khusnun et al., 2021).

Pengarustamaan Moderasi Beragama dalam Pembangunan Manusia di IKN Melalui Integrasi Nasional dan Budaya

Semua agama memang tidak lah sama namun ada nilai atau esensi dari beragam agama yang sama sama mengajarkan kebaikan. Berangkat dari ungkapan tersebut, tentulah kiranya menjadi cara pandang bagi semua kalangan di wilayah IKN baik penduduk lokal maupun pendatang. Menurut Pitoyo dan Triwahyudi dikutip dari Novel Adryan Purnomo dan Argyo Demartoto, di IKN Nusantara, kondisi sosial budaya diperkirakan akan mengalami peningkatan multikulturalisme dalam berbagai aspek seperti nilai, budaya, dan tradisi, yang akan membentuk kompleksitas kota. Perkembangan multikulturalisme ini berpotensi memicu konflik sosial di antara kelompok etnis, terutama antara masyarakat asli dan para pendatang. Saat ini, populasi etnis di Kalimantan Timur didominasi oleh etnis Jawa dengan persentase 30,24%, diikuti oleh etnis Bugis 20,81%, etnis Banjar 12,45%, etnis Dayak 9,94%, etnis Kutai 7,80%, etnis Toraja 2,21%, etnis Paser 1,89%, etnis Sunda 1,57%, etnis Madura 1,32%, etnis Buton 1,25%, serta berbagai etnis lain dari seluruh Indonesia (Purnomo et al., 2022).

Keragaman suku/etnis maupun budaya tersebut, tentunya dapat memicu konflik. Misalnya saja konflik Sampit yang melibatkan suku Dayak dengan Madura pada tahun 2001, ditengarai akibat memuncaknya gesekan perbedaan karakter/budaya (Intani et al., 2022). Sebaliknya, keragaman suku maupun budaya tersebut jika dimaknai dengan cara pandang yang moderat dalam melihat perbedaan tersebut menjadi kunci terciptanya harmoni. (Arifandi et al., 2023) Untuk mewujudkan itu, tentulah peran semua pihak diperlukan. Misalnya saja para ASN yang akan migrasi ke IKN tentunya perlu discreening dan dibekali nilai-nilai moderasi agar mampu memahami dan menghargai keberadaan penduduk lokal dengan segala adat istiadat dan budayanya. Dengan bekal mempunyai sikap yang moderat, nantinya bisa menyikapi segala perbedaan dengan adil dan berimbang (jalan tengah), seperti moderasi yang dimaknai oleh Kementerian Agama RI. (Ri, 2019) Dengan pemahaman moderasi beragama yang kuat akan menciptakan sikap inklusifitas terhadap berbagai bentuk keragaman, memberikan akses dan peluang yang sama bagi setiap orang. hal ini akan menghilangkan hambatan dan diskriminasi yang bisa saja dialami oleh kelompok minoritas, dan mewujudkan kerangka kerja yang partisipatif, kesetaraan, dan keadilan (Hidayatulloh & Sumantri, 2023).

Dengan beragamnya suku, etnis, budaya maupun agama, tentulah bukan menjadi halangan untuk menciptakan harmoni berbangsa. Integrasi nasional sebagai suatu kesadaran dan bentuk interaksi akan menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan: bangsa Indonesia (Irianto, 1977). Sebagai sebuah contoh berbagai identitas dapat disatukan oleh kesamaan kepentingan yang dikonstruksi oleh media massa, seperti halnya gaya hidup yang mengikuti artis tertentu. Penelitian Olivia M Kaparang menunjukkan bahwa gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh budaya orang lain yang dikonstruksi sedemikian rupa, misalnya pada kasus K-Pop Korea. (Olivia M Kaparang, 2013)

Berkaitan dengan migrasi di wilayah IKN, tentunya hal seperti ini bisa dilakukan bukan dengan tujuan untuk merubah gaya hidup orang lain, yang multikultur, minimal memahami budaya, adat, agama dan sebagainya demi tujuan bersama. Ajaran tentang moderasi penting pada bangsa Indonesia yang beragam, karena menurut Sutrisni dikutip dari Munawir dkk, Indonesia sebagai bangsa yang multikultur membutuhkan moderasi beragama (Munawir et al., 2020). Dogma dogma agama pun dapat dilakukan dengan nilai nilai tujuan bersama yakni kebaikan. Karena integrasi nasional terjadi akibat terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial. Irianto, "Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme Di Indonesia", 4 Menurut Genovaité Liobikiené religiusitas berpengaruh baik terhadap perilaku manusia maupun pada sikap (Liobikiené et al., 2016). Untuk itu, penanaman nilai nilai moderat di wilayah IKN perlu terus diusahakan dengan harapan dapat memengaruhi cara pandang seseorang. Menurut Kenneth I Mavor dan Renate Ysseldyk, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh identitas diri religius yang dibentuk oleh internalisasi ekspektasi peran yang ditawarkan oleh agama (Mavor & Ysseldyk, 2020). Pada sisi lain, moderasi beragama perlu dilakukan melalui adat istiadat/budaya yang melekat di wilayah IKN. Pasalnya sikap dan perilaku sangat dipengaruhi oleh budaya yang berakar pada agama (Van Tongeren et al., 2021). Pada sisi lain juga bisa dilakukan melalui symbol symbol yang menggambarkan pentingnya moderasi beragama, karena dengan symbol itu pula dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Hal ini dibuktikan dengan penelitian bahwa pemakaian Songkok bersymbol NU secara tidak sadar telah membentuk dan mempengaruhi secara persuasif para siswa untuk berperilaku selayaknya pesan-pesan sebagaimana yang digaungkan

NU (Muslim & Werdiningsih, 2023), seperti bersikap adil, tengah tengah dan berimbang.

Kesimpulan

Tidak dipungkiri, kehadiran IKN dan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur akan memberikan banyak dampak, baik positif maupun negative. Dari aspek positif, keberadaan IKN akan meningkatkan taraf ekonomi, keberlangsungan hidup dan sebagainya. Namun dari aspek negative, perpindahan Ibu Kota Negara ke IKN berpotensi memicu terjadinya konflik. Sebuah pendekatan melalui moderasi beragama penting dilakukan guna mengantisipasi adanya konflik horizontal. Pendekatan moderasi beragama bisa saja dilakukan melalui integrasi nasional, dogma dogma agama dan penggunaan symbol symbol budaya yang berakar pada agama.

Daftar Pustaka

- Arifandi, A., Fathikasari, S. E., & Kurniasih, M. (2023). Membangun Harmoni Dan Toleransi Melalui Moderasi Beragama. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 4(2), 164–177.
- Azzahra, S. E., Musyafa, R., & Furqan, M. D. (2023). Pengaruh Kebijakan Migrasi Terhadap Integrasi Sosial dan Budaya : Kasus Migran di Asia Tenggara. *Unes Law Review*, 6(1), 3327–3334.
- Christover, D. (2019). Peran pemuda lintas agama dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Paradigma*, 8(1), 114–128.
- Djayanti, Hana, D., & Al, E. (2022). POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA THE POTENTIAL OF SOCIAL CONFLICT IN CAPITAL RELOCATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 8(1), 1–15.
- Hidayatulloh, T., & Sumantri, T. (2023). PENGEMBANGAN PEMAHAMAN SIKAP MODERASI BERAGAMA BERBASIS NILAI INKLUSIVITAS PADA MAHASIWA DI PERGURUAN TINGGI. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 7(1), 87–102.
- Ibu Kota Nusantara*. (n.d.).
- Intani, N. P., Nadzifah, S., Hakim, A. L., & Hasan, M. (2022). PERANG SAMPIT (KONFLIK SUKU DAYAK DENGAN SUKU MADURA) PADA TAHUN 2001. *SOSIAL : Jurnal Peneitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 14–18.
- Irianto, A. M. (1977). *Integrasi nasional sebagai penangkal etnosentrisme di indonesia*. 1–6.
- Jaya, S. (2022). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA*. 13(2), 155–168. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>

- Kodir, A., Hadi, N., Astina, I. K., Taryana, D., & Ratnawati, N. (2021). *The dynamics of community response to the development of the New Capital (IKN) of Indonesia. Nugroho 2020*, 57–61. <https://doi.org/10.1201/9781003178163-13>
- Kusno, A. (2017). ANALISIS WACANA PERCAKAPAN WARGA DALAM GRUP FACEBOOK BUBUHAN SAMARINDA : IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK SOSIAL DISCOURSE ANALYSIS OF CITIZENS CONVERSATION IN FACEBOOK GROUP CALLED ‘ BUBUHAN SAMARINDA ’: IDENTIFICATION OF POTENTIAL SOCIAL CONFLICT. *Masyarakat Dan Budaya*, 19(1), 89–104.
- Liobikienė, G., Niaura, A., Mandravickaitė, J., & Vabuolas, Ž. (2016). Does religiosity influence environmental attitude and behaviour? The case of young Lithuanians. *European Journal of Science and Theology*, 12(1), 81–96.
- Ma, M. Q. S. (1996). *WAWASAN AL-QURAN*. Mizan.
- Mavor, K. I., & Ysseldyk, R. (2020). A social identity approach to religion: religiosity at the nexus of personal and collective self. In *The Science of Religion, Spirituality, and Existentialism*. INC. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817204-9.00015-9>
- Mukhtar, & Hamidah, T. (2021). Pentingnya Nilai Persatuan Perpektif Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 103 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Online Studi Al-Qur An*, 17(02). <https://doi.org/10.21009/JSQ.017.2.07>
- Munawir, Mukaromah, L., & Firmansyah, M. R. (2020). URGENSI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI). *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 7(2), 195–208.
- Muslim, A., & Werdiningsih, W. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama dan Simbol Keagamaan (Pembentukan Identitas Islam Moderat Anak Melalui Songkok NU Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter Berger). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 29–42.
- Nisa, Khusnun, M., Yani, A., Andika, Yunus, Mulyo, E., & Rahman, Y. (2021). Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital Muria. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 731–748. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>
- Nurdin, F. (2021). *Moderasi Beragama menurut Al- Qur ’ an dan Hadist*. 18(1), 59–70.
- Olivia M Kaparang. (2013). ANALISA GAYA HIDUP REMAJA DALAM MENGIMITASI BUDAYA POP KOREA MELALUI TELEVISI (Studi pada siswa SMA Negeri 9 , Manado) Pendahuluan. “*Acta Diurna*, 3(2).
- Purnomo, N. A., Demartoto, A., Nasional, I., & Sosial, H. (2022). STRATEGI INTEGRASI NASIONAL BERBASIS PLULARITAS DAN MULTIKULTURALISME DALAM MENJAGA HARMONI SOSIAL DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI*, 73–76.
- Puspitaningrum, S. R., & Sundoko, H. F. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara : Pembangunan Kota Inklusif dan Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Politik RESOLUSI*, 6(2), 127–147. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6096>

- Republik, N. (2022). *UU NO 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA*.
- Ri, K. A. (2019). *Moderasi Beragama* (1st ed.). Balitbang Kemenag.
- Rosyad, R., & Setia, P. (2021). *KAMPANYE MODERASI BERAGAMA: DARI TRADISIONAL MENUJU DIGITAL*.
- Santoso, G., Aulia, A. N., Indah, B. S. N., & Lestari, D. P. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 183–194.
- Sumarni dkk. (2021). *Development, Social Change And Environmental Sustainability* (S. Dkk (Ed.)). CRC Press; Taylor & Francis Group.
- Susanto, Hari, P. (2022). Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara Socio-Cultural Transformation People of IKN Nusantara. *JJSKP: Urnal Studi Kebijakan Publik*, 1, 43–56.
- Ulya, F. N. (2024). *38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya”, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/>. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/12491701/38-kementerian-lembaga-pindah-ke-ikn-tahap-pertama-berikut-rinciannya>
- Van Tongeren, D. R., DeWall, C. N., Chen, Z., Sibley, C. G., & Bulbulia, J. (2021). Religious residue: Cross-cultural evidence that religious psychology and behavior persist following deidentification. *Journal of Personality and Social Psychology*, 120(2), 484–503. <https://doi.org/10.1037/pspp0000288>